

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
TERSANGKA PELANGGAR HAM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA**

**Meisya Adinda Putri Kania¹, Revanissa Dwi Hardianti Putri²,
Dewi Asri Puanandini³**
meisyaapk1@gmail.com¹, revanissadwii@gmail.com²,
dephee.bringka@gmail.com³
Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia sudah menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem hukum dan peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan tersangka yang diduga bersalah. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tersangka pelanggar HAM dilindungi dengan beberapa hak, seperti hak untuk dianggap tidak bersalah, hak atas pengakuan tanpa tekanan, hak atas perlindungan fisik dan psikologis, hak atas kepastian hukum yang adil, dan hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Untuk meningkatkan perlindungan HAM terhadap tersangka pelanggar HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia, langkah-langkah strategis perlu diambil. Salah satunya ialah membangun sistem peradilan yang berkeadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menciptakan proses hukum yang adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Diharapkan upaya ini dapat secara signifikan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, menghasilkan proses hukum yang lebih adil dan jelas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Peradilan Pidana.

***Abstrak:** Protection of human rights has become one of the main principles in the legal and criminal justice systems in various countries, including Indonesia. However, its implementation in the field often faces various difficulties, especially in handling cases of human rights violations involving suspects who are suspected of being guilty. In the Indonesian criminal justice system, suspected human rights violators are protected by several rights, such as the right to be presumed innocent, the right to confession without pressure, the right to physical and psychological protection, the right to fair legal certainty, and the right to be treated equally before the law. To increase human rights protection for suspected human rights violators in the Indonesian criminal justice system, strategic steps need to be taken. One of them is building a just justice system, which aims to increase respect for human rights, create a fair and transparent legal process, and strengthen public trust in the justice system. It is hoped that this effort can significantly increase the protection of human rights, produce fairer and clearer legal processes, and strengthen public trust in justice in law enforcement in Indonesia.*

***Keyword:** Human Rights, Criminal Justice.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tiap individu sejak lahir sekaligus tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun. Perlindungan terhadap HAM sudah menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum dan keadilan pidana di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi perlindungan HAM di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan dilema, terutama dalam kasus pelanggaran HAM dengan tersangka tertentu. Dalam peradilan pidana, perlindungan HAM terhadap tersangka pelanggar HAM menjadi isu yang sangat penting dan kompleks. Tersangka pelanggar HAM seringkali dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat dan tekanan publik yang kuat. Stigma dan tekanan tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tersangka pelanggar HAM mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Perlakuan yang adil terhadap tersangka pelanggaran HAM melibatkan berbagai hak dasar. Ini mencakup hak untuk menerima pembelaan yang layak, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, hak untuk menjalani proses hukum yang adil, serta hak untuk tidak mengalami perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi.

Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menghormati martabat kemanusiaan tersangka, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Sebagai negara yang mempertahankan hukum dan hak asasi manusia, Indonesia sudah mengambil langkah-langkah internasional dan domestik untuk memastikan bahwa semua warganya dilindungi, termasuk orang-orang yang sedang dalam proses peradilan pidana. Beberapa pelanggaran HAM berat misalnya yang berlangsung selama era Orde Baru, dan konflik internal di beberapa wilayah, sudah mengiringi sejarah Indonesia dalam berbagai periode. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia, Indonesia membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan ini bertugas untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, contohnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kehadirannya mencerminkan tekad Indonesia dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat mendapat hukuman yang setimpal.

Namun, penegakan hukum kepada pelanggar HAM berat tidak selalu berjalan mulus. Tersangka pelanggar HAM sering kali menghadapi situasi yang sulit, di mana hak-hak dasar mereka tidak sepenuhnya dihormati. Beberapa masalah yang sering terjadi meliputi penyiksaan selama penahanan, intimidasi, kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang layak, serta menjalani proses hukum yang tidak transparan dan tidak adil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka pelanggar HAM juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan budaya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan aparat penegak hukum terkait HAM, korupsi yang masih merajalela, dan intervensi politik ialah beberapa faktor yang memperburuk situasi ini.

Selain itu, stigma negatif yang melekat pada tersangka pelanggar HAM sering kali menyebabkan perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminatif. Pentingnya perlindungan HAM bagi tersangka pelanggar HAM tidak hanya untuk menjaga martabat kemanusiaan, tetapi juga untuk memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. Penghormatan terhadap hak-hak tersangka ialah salah satu pilar utama dari sistem peradilan yang kredibel. Tanpa perlindungan yang memadai, integritas sistem peradilan pidana dapat terancam, dan kepercayaan publik terhadap keadilan dapat menurun. Selain itu, pelanggaran HAM terhadap tersangka dapat menciptakan siklus kekerasan dan ketidakadilan yang sulit untuk diputus.

Penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Sahyana, Y. penulis membahas upaya dan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Fokus utama dari tulisan tersebut adalah evaluasi kebijakan dan praktik yang ada untuk memastikan

hak asasi manusia dilindungi dan dihormati sepanjang proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Syahna menekankan betapa pentingnya reformasi peradilan dan peningkatan kapasitas institusi hukum untuk melindungi hak-hak individu, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Penulis disertasi doktoral Andriyanto, R. dan Hartanto, S. H. menyelidiki elemen perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana baik terhadap tersangka maupun korban (saksi). Fokus tulisan tersebut adalah pada cara perlindungan HAM dapat diterapkan secara merata untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses hukum pidana menerima keadilan. Penulis menekankan betapa pentingnya melindungi hak tersangka untuk pengadilan yang adil, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Di sisi lain, penulis menekankan bahwa mekanisme yang efektif diperlukan untuk melindungi hak-hak saksi dan korban, termasuk hak untuk memberikan kesaksian tanpa khawatir akan intimidasi atau balas dendam. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya reformasi kebijakan dan praktik peradilan pidana untuk memastikan hak asasi manusia dilindungi dan dihormati bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan.

Penelitian ini berkonsentrasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran HAM di sistem peradilan pidana. Dengan tujuan melindungi martabat manusia dan hak-hak asasi setiap orang yang berhadapan dengan hukum, perlindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti persamaan di hadapan hukum, pengakuan yang layak selama proses hukum, perlindungan dari kekerasan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan HAM juga berdampak besar pada kesejahteraan sosial, stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi karena meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia, menanamkan kepercayaan, dan mencegah konflik. Langkah-langkah strategis seperti pengembangan sistem peradilan yang lebih adil, penguatan peran hukum pidana, dan penyediaan bimbingan dan pendampingan melalui organisasi masyarakat lokal dan LSM diperlukan untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ini akan memastikan bahwa setiap orang, terutama tersangka atau terdakwa, mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sesuai dengan hak mereka, dan mendorong mereka untuk kembali ke masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif berfokus pada standar hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan dalam jurnal ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman dan analisis masalah hukum yang menjadi fokus penelitian dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan karya hukum lainnya. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, yang mencakup pemeriksaan laporan dari Undang-Undang, Jurnal, Media Massa dan juga Artikel yang relevan. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana peraturan saat ini digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Terhadap Tersangka Pelanggar HAM dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka yang melanggar HAM dalam sistem peradilan pidana merupakan komponen penting dalam menjamin keadilan dan keberlanjutan sistem hukum yang adil dan transparan. Perlindungan ini mencakup beberapa hak dan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa tersangka dilayani dengan adil dan relevan dengan prinsip-prinsip HAM. Penyidikan terhadap tersangka pidana, terutama selama proses interogasi diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menjamin

bahwa terdakwa atau tersangka tetap dihormati dan diperlakukan relevan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hak asasi manusia memiliki peran krusial dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, antara lain:

a. Jaminan Persamaan di Hadapan Hukum :

Tiap individu wajib diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang didasarkan pada hal-hal yang tidak bersifat hukum. Hak untuk perlindungan hukum yang adil, hak untuk diadili secara terbuka, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ialah perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan integritas sistem peradilan di tiap negara yang mempertahankan hak asasi manusia dan juga demokrasi.

b. Hak Atas Pengakuan :

Hak untuk mendapatkan pengakuan yang layak selama proses hukum ialah salah satu hak utama tersangka atau terdakwa. Mereka tidak boleh dipaksa untuk mengakui kesalahan atau memberikan keterangan di bawah tekanan atau ancaman. Hak ini mencakup perlindungan terhadap segala bentuk intimidasi, pemaksaan, atau penyiksaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi yang dapat memberatkan diri mereka sendiri. Selain itu, tersangka atau terdakwa juga berhutang budi kepada pengadilan karena pelanggaran mereka. Prinsip ini merupakan komponen penting dari sistem peradilan yang adil dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan hak-hak asasi tiap orang yang berhadapan dengan hukum.

c. Jaminan Perlindungan :

Selama proses hukum, terdakwa atau tersangka harus dilindungi dari kekerasan, ancaman, atau intimidasi. Jaminan keamanan fisik dan psikologis selama penangkapan, penahanan, penyidikan, dan persidangan ialah bagian dari perlindungan ini. Sangat penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa terdakwa atau tersangka diperlakukan dengan hormat dan martabat, dan bahwa mereka tidak menjadi korban kekerasan fisik atau mental oleh penegak hukum atau pihak lain. Selain itu, hak untuk tidak disiksa atau dipaksa memberikan pengakuan di bawah tekanan merupakan bagian dari hak untuk dilindungi dari kekerasan dan intimidasi. Perlindungan ini menjadi bagian penting dalam menjamin keadilan, integritas, dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

d. Kepastian Hukum Yang Adil :

Tersangka atau terdakwa berhak atas kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif selama proses peradilan. Ini berarti bahwa tiap proses hukum harus mengikuti prinsip keadilan dan memperlakukan tersangka atau terdakwa secara setara tanpa memandang status sosial, agama, suku, atau jenis kelamin mereka. Hak atas kepastian hukum yang adil mencakup hak untuk diberitahu dengan jelas terkait tuduhan yang dihadapi dan hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak. Selain itu, keputusan hukum harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Penegakan hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi sangat penting untuk menjamin bahwa tiap individu menjalani proses hukum yang transparan dan relevan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pendekatan ini juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

e. Hak Atas Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum :

Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lain. Prinsip ini menjamin bahwa tiap individu memiliki hak yang sama dalam proses peradilan., termasuk hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak, dan hak saat pengadilan mengadili harus netral. Hal ini berlaku untuk semua tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penangkapan dan penahanan

hingga penyidikan dan persidangan. Ini menunjukkan bahwa praduga yang tidak relevan dengan kasus hukum tidak boleh memengaruhi keputusan atau tindakan. Oleh karena itu, tersangka yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilindungi melalui beberapa cara, termasuk hak atas pengakuan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

2. Alasan Hak Asasi Manusia Harus Dilindungi

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki banyak alasan penting dalam kehidupan nasional dan internasional. Perlindungan HAM ini berdampak besar pada kesejahteraan sosial, stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi, bukan hanya dalam konteks individu. Berikut ini ialah beberapa alasan mengapa HAM harus dilindungi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

a. Meningkatkan Martabat dan Kesejahteraan Manusia

Salah satu hak yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk sosial ialah hak asasi manusia. Tujuan dari hak asasi manusia ialah melindungi hak tiap individu untuk diakui dan diberi martabat yang sama sebagai manusia. Ketika negara mengakui dan melindungi hak-hak tersebut, kesejahteraan manusia dapat tercapai.

b. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Keamanan

Ketegangan sosial dapat timbul akibat ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat, bahkan dapat memicu konflik yang merugikan banyak pihak. Ketika hak-hak dasar seseorang dilanggar atau diabaikan, rasa ketidakpuasan dan kemarahan dapat tumbuh di dalam masyarakat. Hal ini sering kali berujung pada protes, kekerasan, dan kerusuhan yang mengguncang stabilitas sosial. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas sosial, perlindungan hak asasi manusia sangat penting karena ini dapat mengurangi ketegangan sosial dengan memastikan bahwa tiap orang dilayani dengan adil dan hak-hak mereka dihormati. Perlindungan HAM juga berperan dalam menciptakan rasa kepercayaan dan keamanan di antara masyarakat, yang pada gilirannya membantu mencegah terjadinya konflik. Secara keseluruhan, perlindungan hak asasi manusia ialah langkah yang efektif untuk membangun dan memelihara perdamaian serta keharmonisan dalam masyarakat.

3. Upaya Yang dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penguatan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum. Tujuan dari langkah-langkah strategis ini ialah untuk memastikan bahwa tiap orang, terutama mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa, mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang relevan dengan hak mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan ialah:

a. Pengembangan Sistem Peradilan Pidana yang Perkeadilan

Memperkuat peran hukum pidana dalam sistem peradilan dapat memfasilitasi pembuatan kebijakan yang lebih baik dan memberikan landasan hukum untuk implementasi kebijakan. Badan legislatif memiliki peran yang mungkin terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan program kebijakan yang diidentifikasi. Sebagai hasilnya, semua ini tercakup dalam politik hukum, yang secara substansial terdiri dari tiga aspek: pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.

b. Bimbingan dan Pendampingan

Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya organisasi masyarakat lokal dan LSM lainnya untuk memberikan bimbingan dan nasehat dalam menjamin hak asasi manusia. Dukungan dan bimbingan ini sangat penting terutama bagi klien pemasyarakatan dewasa yang membutuhkan dukungan tambahan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. LSM dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan konseling, dukungan psikologis, dan pelatihan keterampilan yang diperlukan melalui program yang dirancang khusus. Dengan cara ini, klien lembaga pemasyarakatan dewasa

tidak hanya menerima dukungan hukum dan psikologis, namun juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan produktif sesudah dipenjara. Upaya ini meningkatkan rasa keadilan dan kemanusiaan di masyarakat dan membantu mencegah pelanggaran hak asasi manusia kedepannya.

KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka pelanggar HAM sangat penting untuk memastikan keadilan dan integritas hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk hak atas pengakuan yang layak tanpa adanya paksaan atau tekanan, perlindungan fisik dan psikologis dari kekerasan atau intimidasi, kepastian hukum yang adil dan transparan, serta perlakuan yang sama di semua tahap proses peradilan. Upaya untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan dengan mencegah konflik dan ketegangan sosial ialah bagian penting dari perlindungan HAM. Untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, langkah strategis yang perlu diambil meliputi pengembangan sistem peradilan yang berkeadilan melalui peran legislatif dalam pembentukan dan penegakan hukum yang adil, serta mendorong dan mendukung LSM dan organisasi masyarakat untuk reintegrasi sosial dan mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih baik melindungi HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(4), 227-236. H.233
- Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(4), 227-236.
- Sahyana, Y. (2020). Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Konstituen, 2(2), 75-87.
- Ediwarman, H. (2000). Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (the Human Rights Protection in the Process of Justice). Indonesian Journal of Criminology, 1(1), 4230.
- Andriyanto, R., & Hartanto, S. H. (2020). Perlindungan Ham Terhadap Tersangka dan Korban (Saksi) dalam Proses Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 terkait Pengadilan HAM.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (Ham ialah Dasar Manusia Yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah, 2016)
- (Upaya Perlindungan HAM Bagi Klien Pemasarakatan Dewasa Melalui Pendampingan Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2023).